



Seri Dukungan KOMPAK untuk Kebijakan Nasional

## SEPAKAT: Alat Analisis Data bagi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bukti

Indira Sari dan Purry Andriaty

Desember 2021

### Latar Belakang

RPJMN menargetkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024 menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen, dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54. Untuk mencapai target-target tersebut, diperlukan sinergi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan strategi, program, dan kegiatan yang terintegrasi dan tepat sasaran agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan.

Salah satu hal yang diperlukan untuk memperkuat sinergi adalah acuan data yang sama bagi pusat dan daerah. Hal ini masih menjadi tantangan tersendiri karena belum tersedia portal data dan informasi yang secara komprehensif menyajikan data dan hasil analisis data kemiskinan yang dapat menjadi rujukan bersama pusat dan daerah. Ketiadaan ini mengharuskan pusat dan daerah menggunakan data/informasi dasarnya masing-masing. Akibatnya, analisis yang dihasilkan baik oleh pusat maupun daerah belum komprehensif menggambarkan situasi kemiskinan, sehingga belum dapat dirujuk oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan lebih tepat sasaran.

Memfasilitasi pusat dan daerah dalam menganalisis data yang sama untuk formulasi strategi, program, dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing memerlukan suatu alat analisis yang memungkinkan dihasilkannya informasi yang *reliable* sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, baik dalam hal intervensi, lokasi, termasuk menentukan sasaran dari intervensi yang dipilih. Alat analisis tersebut tidak saja merekam data dari berbagai kementerian/ lembaga dalam satu 'pusat data', tetapi juga mengolah gabungan sejumlah data dari kementerian/ lembaga tersebut secara simultan dengan metode analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu, yang disingkat SEPAKAT, merupakan alat analisis inovatif yang mengolah data dari lintas kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah menjadi informasi yang siap dimanfaatkan pemerintah daerah dan pusat untuk perumusan dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Sebagai aplikasi, SEPAKAT berfungsi sebagai '*processor*' untuk mengolah data/informasi, dan berfungsi untuk menyajikan hasil pengolahan data yang diperlukan dalam suatu analisis kemiskinan wilayah kabupaten/kota dan provinsi.

SEPAKAT merekam data utama yang dibutuhkan dalam analisis situasi kemiskinan setiap kabupaten/kota dan provinsi. Data utama meliputi data pelayanan dasar, perlindungan sosial, ketenagakerjaan dan peningkatan ekonomi, serta ekonomi makro daerah. Sumber data tersebut meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Potensi Desa, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), data sektor, serta data program prioritas nasional dan daerah. SEPAKAT mengolah data tersebut secara simultan sehingga menghasilkan informasi dasar yang komprehensif tentang situasi kemiskinan daerah. Informasi dasar ini diharapkan memperkuat pemerintah daerah dalam menelusuri akar masalah kemiskinan daerahnya sehingga membantu mengarahkan pilihan strategi, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan lebih tepat sasaran karena berbasis bukti.

Dalam rangka memperkuat budaya pengambilan kebijakan berbasis bukti, KOMPAK mendukung pemerintah pusat dalam pemutakhiran, peningkatan kualitas, dan berbagi pakai data lintas kementerian/Lembaga (K/L), serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menginterpretasi hasil analisis data yang disediakan SEPAKAT dan memanfaatkannya dalam formulasi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah yang diinternalisasi ke dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), serta Rancangan Teknis dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

## Perubahan yang Dihasilkan

SEPAKAT saat ini menjadi satu aplikasi yang telah mengintegrasikan dan mengolah data/informasi dari berbagai kementerian teknis secara simultan ke dalam bentuk hasil analisis data/informasi kemiskinan untuk proses pengambilan keputusan. Pemutakhiran data yang terus dilakukan, termasuk dalam menambah indikator, menunjukkan kesiapan aplikasi ini untuk terus beradaptasi mengikuti dinamika kebutuhan analisis kemiskinan wilayah.

Perubahan yang paling dirasakan pemerintah daerah dengan adanya SEPAKAT adalah, pemerintah daerah lebih mudah menggunakan data. Pemerintah daerah tidak lagi harus melakukan input data, tetapi cukup menggunakan data nasional yang telah diolah untuk analisis kemiskinan setiap provinsi dan kabupaten/kota. Analisis kemiskinan tersebut dapat diperinci untuk wilayah kecamatan dan desa/kelurahan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada tahap interpretasi data/informasi yang telah disajikan SEPAKAT dan pemanfaatannya untuk formulasi program. Kemudahan penggunaan data yang disediakan SEPAKAT menjadikan penggunaan SEPAKAT tidak terbatas pada provinsi/kabupaten/kota dampingan SEPAKAT<sup>1</sup>.

Berikut beberapa contoh daerah yang telah menggunakan SEPAKAT beserta perubahan yang dihasilkan. Selengkapnya dapat dilihat pada *Booklet Sepakat* (KOMPAK, 2021).

- Dengan menggunakan aplikasi SEPAKAT, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Timur menyadari bahwa walaupun kenaikan kemiskinan di perkotaan lebih tinggi, jumlah penduduk miskin di pedesaan jauh lebih banyak. Berdasarkan fakta tersebut, TKPKD Provinsi Jawa Timur merekomendasikan agar upaya percepatan penurunan kemiskinan di Jawa Timur difokuskan pada penanggulangan kemiskinan perdesaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur merespons rekomendasi ini dengan menyalurkan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 5 fokus program, yaitu bantuan sosial individu dan keluarga, pemberdayaan masyarakat desa dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ketenagakerjaan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

<sup>1</sup> Contoh kabupaten/kota yang telah memanfaatkan SEPAKAT dapat dilihat pada <https://sepakat.bappenas.go.id/km/home/pemanfaatan>

- Aplikasi SEPAKAT telah membantu Provinsi DKI Jakarta menemukan fakta bahwa penduduk miskin kronis, miskin, dan rentan miskin yang bekerja pada sektor perdagangan, restoran, dan perhotelan merupakan yang paling terdampak pandemi COVID-19. Untuk itu, dalam revisi RPJMD 2017-2022, Pemerintah DKI Jakarta mengarahkan programnya untuk fokus pada penanganan krisis dan dampak pandemi. Program dimaksud meliputi program mitigasi bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, memastikan stabilitas harga, akses terhadap komoditas pokok, ketersediaan pangan pokok, dan peningkatan pendapatan.
- Aplikasi SEPAKAT telah membantu Kabupaten Polewali Mandar yang sebelumnya menghadapi persoalan ketersediaan data yang *reliable* untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Mulai tahun 2020, kabupaten ini menggunakan aplikasi SEPAKAT untuk membantu pengembangan program yang lebih menjawab permasalahan yang sebenarnya.
- Kabupaten Pekalongan mampu memperkuat kapasitas Laboratorium Kemiskinan dengan dukungan aplikasi SEPAKAT. Laboratorium Kemiskinan yang merupakan wadah kolaborasi lintas perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan telah mengoptimalkan aplikasi SEPAKAT dalam mengembangkan strategi dan program bagi kelompok sasaran kasus kemiskinan kronis. Program yang berorientasi pada penanganan kasus kemiskinan kronis ini telah membawa Laboratorium Kemiskinan Kabupaten Pekalongan masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik.

## Bentuk Dukungan KOMPAK

Pengembangan SEPAKAT awalnya merupakan kolaborasi KOMPAK dengan Bank Dunia pada tahun 2017 untuk mendukung pemerintah Indonesia agar memiliki alat bantu analisis kemiskinan nasional dan regional serta prioritasasi program. Alat bantu tersebut diharapkan membantu memberdayakan pemerintah daerah menganalisis kemiskinan di wilayahnya.

Dalam pengembangan dan pemanfaatan SEPAKAT, KOMPAK mendukung sejumlah kegiatan di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat, KOMPAK bersama Bank Dunia memberikan dukungan teknis melalui kepemimpinan dan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sedangkan di daerah, KOMPAK menyediakan dukungan teknis melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan lintas perangkat daerah pengampu program penanggulangan kemiskinan daerah.

Di tingkat pusat, KOMPAK mendukung Bappenas dalam beberapa hal berikut:

- a) Mengembangkan sistem/aplikasi SEPAKAT dan mendukung pemutakhiran data yang direkam dalam Aplikasi. Dukungan diberikan dalam bentuk fasilitasi diskusi teknis antara Bappenas dengan kementerian/lembaga sumber data seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Fasilitasi diskusi teknis ini bertujuan mendukung proses integrasi sistem data dan informasi agar basis data dan analisis kemiskinan untuk proses perencanaan dan penganggaran yang *pro-poor* semakin sempurna serta memperkuat proses pemantauan dan evaluasi yang terukur.
- b) Menyusun serta mengujicobakan berbagai modul, yang meliputi:
  - Modul penggunaan SEPAKAT. Sedikitnya terdapat enam modul yang saat ini dapat diakses melalui [https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Main\\_Page](https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Main_Page) yaitu modul analisis SEPAKAT, modul perencanaan, modul penganggaran, modul *monitoring*, modul evaluasi, dan modul pengetahuan;
  - Modul peningkatan kapasitas kabupaten/kota, meliputi modul Pengantar SEPAKAT, panduan Pengguna SEPAKAT, panduan Pemanfaatan SEPAKAT, dan modul Pelatihan bagi Pelatih SEPAKAT.

c) Mendukung strategi pelebagaan SEPAKAT, antara lain:

- Membentuk Sekretariat Bersama dan Sentra Pembelajaran Regional (SPR). SPR yang terdiri dari konsorsium perguruan tinggi dan lembaga nonpemerintah merupakan mitra Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dalam memperkuat kapasitas TKPK kabupaten/kota. SPR memiliki fungsi untuk mendampingi pemerintah daerah, khususnya TKPK provinsi/kabupaten/kota, dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, *monitoring*, dan evaluasi program serta kegiatan yang mendukung percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. SPR menjalankan fungsi tersebut melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, riset, advokasi, dan pengelolaan pengetahuan.
- Mengembangkan *Master Trainers* melalui *Training of Trainers*. *Master Trainers* tidak hanya berasal dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat-Bappenas, namun juga dari direktorat terkait di Bappenas dan kementerian/lembaga lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pekalongan juga termasuk dalam *Master Trainers* ini.
- Menyusun panduan pelebagaan SEPAKAT dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Standar Operasional Prosedur Peningkatan Kapasitas Kabupaten/Kota.

Di tingkat daerah, KOMPAK memberi dukungan kepada Bappeda dan perangkat daerah dalam bentuk peningkatan kapasitas pemerintah dan lembaga daerah. Peningkatan kapasitas menggunakan empat serial modul yang telah dikemukakan sebelumnya.

## **Keberlanjutan Upaya Perbaikan**

Pemerintah daerah telah memanfaatkan SEPAKAT untuk mengarusutamakan penanggulangan kemiskinan melalui analisis permasalahan, proses perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan pada sektor terkait. Pemerintah pusat pun telah memanfaatkan SEPAKAT untuk menganalisis permasalahan kemiskinan secara nasional dan regional dalam formulasi dukungan kebijakan yang lebih tepat dan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi, kebijakan, serta program/kegiatan nasional dan daerah.

Agar budaya pengambilan kebijakan berbasis bukti terpelihara dan kuat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan agar:

### **Pemerintah pusat:**

- a) mengalokasikan sumber daya untuk mengelola data dan informasi termasuk memutakhirkan dan melengkapi data yang digunakan SEPAKAT;
- b) memastikan keberlanjutan penyediaan layanan pelatihan, pendampingan/*mentoring* penggunaan SEPAKAT, termasuk mengembangkan pelatihan-pelatihan tematik yang dikelola Sekretariat Bersama ataupun SPR berdasarkan kebutuhan daerah;
- c) mempercepat sinkronisasi SEPAKAT dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memperluas integrasi sistem data dan informasi sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perencanaan dan penganggaran daerah.

### **Pemerintah provinsi:**

- a) memperbanyak tenaga pelatih di tingkat provinsi/kabupaten;
- b) berkolaborasi dengan perguruan tinggi setempat dan lembaga nonpemerintah yang peduli dan bergerak dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, termasuk dalam pengelolaan pelatihan, pendampingan, riset, advokasi, dan pengelolaan pengetahuan.

**Pemerintah kabupaten/kota:**

- a) mendorong pemanfaatan SEPAKAT dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah dapat mendorong pemanfaatan SEPAKAT ini antara lain melalui kebijakan penyusunan RKPD, kebijakan evaluasi paruh waktu RPJMD, ataupun dalam prosedur evaluasi kegiatan tahunan.
- b) memastikan adanya peningkatan kapasitas yang berkelanjutan dalam pemanfaatan SEPAKAT. Hal ini dapat diwujudkan terutama dengan mengantisipasi mutasi/rotasi staf. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengagendakan kegiatan peningkatan kapasitas secara berkala bagi aparaturnya, termasuk pelatihan-pelatihan tematik untuk mengarahkan pemanfaatan SEPAKAT pada dokumen perencanaan daerah.

**KOMPAK**

Jalan Diponegoro No. 72  
Jakarta 10320 Indonesia  
T: +62 21 8067 5000  
E: [communication@kompak.or.id](mailto:communication@kompak.or.id)  
[www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)